

EVALUASI KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU SETELAH PEMEKARAN

Wal Asri Haryanda, Ir. Andi Oetomo, M.PI., Asirin, S.T., M.T.

Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera
Jalan Terusan Rycudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan 35365

ABSTRAK

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi mengakibatkan banyak terjadi pemekaran daerah. Pemekaran Daerah dilakukan bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat daerah otonom baru sudah berjalan selama 5 tahun maka perlu dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan otonomi daerah tersebut setelah pemekaran. Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru sudah berjalan selama 9 tahun maka sudah sangat perlu dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan Kabupaten Pringsewu dalam kontribusinya terhadap perkembangan Provinsi Lampung setelah pemekaran. Seiring dengan perkembangannya menjadi daerah otonom baru yang memiliki letak strategis membuat Kabupaten Pringsewu seperti sebuah magnet yang menimbulkan berbagai persoalan diantaranya kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, PDRB per Kapita yang hanya sebesar Rp. 17.100 dan kemiskinan menjadi masalah klasik yang belum bisa teratasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dengan fokus sasaran kesejahteraan sosial dan perekonomian daerah. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kuantitatif yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan analisis Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) serta analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan persepsi stakeholders. Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggabungkan dari analisis kuantitatif dan kualitatif diketahui bahwa tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran adalah sedang.

[Evaluation of the Ability Performance of Regional Auotonomy in Pringsewu Regency After Expansion].
The change in the governance system in Indonesia from centralization to decentralization has resulted in many regional expansion. Regional expansion is carried out aimed at shortening the control range of public services in order to improve the community welfare. When the new autonomous region has been running for 5 years, it is necessary to make an evaluation in order to see the development of regional autonomy after the expansion. Pringsewu Regency as a new autonomous region has been running for 9 years, so it is very necessary to do an evaluation to see the development of Pringsewu Regency in its contribution to the development of Lampung Province after the expansion. Along with its development into a new autonomous region that has a strategic location makes Pringsewu Regency like a magnet that raises various problems such as population density, limited job opportunities, GRDP per capita only Rp. 17,100 and poverty is a classic problem that cannot be overcome. The purpose of this study is to determine the level ability of the implementation of regional autonomy in Pringsewu Regency after the expansion with a focus on the target of social welfare and regional economy. The analytical method used is quantitative descriptive analysis using the Human Development Index (HDI) and Economic Performance Index (EPI) also qualitative descriptive analysis that uses stakeholders' perceptions. The results of the analysis and discussion that have been carried out by combining quantitative and qualitative analysis revealed that the level of ability to implement regional autonomy in Pringsewu Regency after the expansion is medium.

Keywords: Regional expansion, regional autonomy, social welfare, regional economy

1. PENDAHULUAN

Sejak memasuki dan mulainya era reformasi menggantikan era orde baru sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang dramatis salah satunya terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan sistem pemerintah tersebut mengakibatkan banyak terjadi pemekaran daerah. Landasan hukum yang pertama kali mengatur tentang desentralisasi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab serta otonomi daerah ialah Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Dengan berjalannya waktu dan dinamika perkembangan serta perubahan yang terjadi di lapangannya maka peraturan tersebut diganti dan diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia.

Dalam upaya percepatan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik menjadi lebih pendek maka salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik ialah dengan melakukan pemekaran daerah agar wilayah yang tidak terjangkau pemerintah tersebut dapat menyelesaikan berbagai persoalannya dan mengembangkan potensinya yang ada serta pemerataan kesejahteraan masyarakat guna meminimalisir bertambah besarnya kesenjangan antar wilayah. Pemekaran daerah diharapkan pula dapat merangsang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah terpencil (Susanti, 2014). Akan tetapi, solusi dari pemekaran daerah ini sering sekali malah menjadi tambahan persoalan seperti kegagalan daerah itu untuk dapat berkembang dikarenakan tujuan pemekaran daerah seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, kemudian disalahgunakan sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan di daerah oleh para kalangan politisi partai politik sebagai perluasan dan perbanyak dukungan suara dari rakyat. Untuk pemekaran daerah di Indonesia dari tahun 1999-2014 dapat dilihat pada **tabel 1.1**.

Di seluruh Indonesia sudah banyak provinsi-provinsi yang melakukan pemekaran daerah kabupaten/kota, salah satunya yaitu Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus,

Tabel 1.1 Pemekaran Daerah di Indonesia Periode 1999-2014

Tahun	Pemerintah Provinsi Baru	Pemerintah Kabupaten Baru	Pemerintah Kota Baru	Jumlah
1999	-	26	1	27
2000	3	1	-	4
2001	-	-	12	12
2002	1	19	3	23
2003	-	49	3	52
2004	1	-	-	1
2007	-	18	5	23
2008	-	22	-	22
2009	-	1	-	1
2012	1	2	-	3
2013	-	9	-	9
2014	-	3	-	3
Total	6	150	24	180

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI, 2014

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Propinsi Lampung, sebagai Kabupaten ke-12 di Provinsi Lampung. Dalam perkembangan keotonomian daerahnya terdapat isu-isu yang berkembang di Kabupaten Pringsewu antara lain seperti (RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031):

- Posisi Kabupaten Pringsewu yang strategis berada pada tengah-tengah jalur koridor barat Provinsi Lampung.
- Kota Pringsewu merupakan wilayah yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp).
- Rencana pengembangan jalan lingkaran luar koridor utara dan selatan Pringsewu. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan kegiatan

pada koridor utama pusat kota, yaitu di Kecamatan Pringsewu.

- Rencana jalur rel kereta api Bandar Lampung – Pringsewu, yang akan melalui Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran.

Dalam pemilihan Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah penelitian dikarenakan sebagai daerah otonom baru Kabupaten Pringsewu menjadi wilayah yang cepat tumbuh berkembang karena didorong oleh posisinya yang strategis dan rentang kendali yang tidak begitu jauh/luas. Kemudian belum ada penelitian-penelitian dari akademisi atau lembaga independen yang sudah melakukan penelitian sejenis ini mengenai evaluasi terhadap otonomi daerah Kabupaten Pringsewu, walaupun dari

pemerintah daerah maupun pusat sudah melakukannya. Selain itu sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwasanya saat daerah otonom baru sudah berjalan selama 5 tahun perlu dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan otonomi daerah tersebut. Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru sudah berjalan selama 9 tahun sudah sangat perlu dilakukan evaluasi guna melihat perkembangannya setelah pemekaran.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian metodologi penelitian akan disampaikan mengenai metodologi pendataan, analisis data, dan metodologi preskripsi.

2.1 Metodologi Pendataan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data-data yang digunakan mengikuti kebutuhan atas sasaran yang akan dievaluasi. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sasaran yang akan dievaluasi yaitu kesejahteraan sosial yang dilihat dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Kemudian perekonomian daerah yang menggunakan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dengan variabel yang digunakan terdiri dari pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, angka kemiskinan, dan rasio PDRB Kabupaten Pringsewu terhadap PDRB

Provinsi Lampung. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh dari publikasi yang dilakukan oleh lembaga statistik terkait yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, berupa daerah dalam angka dan instansi-instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu. Selain data sekunder tersebut untuk lebih mendukung data sekunder yang ada, juga akan digunakan dalam penelitian ini ialah data primer melalui wawancara kepada responden yang dipilih secara *purposive sampling* terkait dengan penelitian dan kebutuhan data yang ingin diperoleh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 2.1** berikut.

2.2 Metodologi Analisis Data

Metodologi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang menjelaskan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya untuk memberikan penjelasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kinerja Ekonomi. Analisis IPM digunakan untuk melihat sejauhmana peningkatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu, sehingga menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati

Tabel 2.1 Pemilihan Stakeholders

Stakeholders Pemerintah	
Responden	Kriteria
Kasubbag Bina Pengembangan Ekonomi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu	Dianggap mengetahui dan mampu menjawab <i>outcome</i> dari perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran
Kasubbid Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja	Mengetahui <i>outcome</i> mengenai kondisi sumber daya manusia/kesejahteraan sosial di Kabupaten Pringsewu dalam perkembangannya menjadi daerah otonomi
Kabid Infrastruktur dan Fisik BAPPEDA	Sangat berperan dalam pembangunan dan dianggap mengetahui <i>outcome</i> dari perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran
Kasubbid Industri di Dinas Koperindag dan UMKM	Dianggap mengetahui <i>outcome</i> dari perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dari sisi ekonomi daerah
Stakeholders Swasta/Pelaku Usaha	
Responden	Kriteria
Pelaku Usaha Genteng	Sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan turut serta didalam perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu
Kepala KCP BCA Kabupaten Pringsewu	Sangat berperan didalam pembangunan dan perkembangan otonomi daerah
Asisten General Manager Urban Style Hotel	Berperan dalam pembangunan dan sangat dibutuhkan didalam perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu yang menjadi daerah persinggahan
Stakeholders Tokoh Masyarakat	
Responden	Kriteria
Ketua Paguyuban Pemuda-Pemudi Dusun II, Pekon Rejosari, Kec. Pringsewu	Dianggap mengetahui kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran
Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pringsewu	
Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu	

umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Analisis IKE digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan peningkatan atau perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menjelaskan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya untuk memberikan penjelasan dari hasil persepsi stakeholder.

2.3 Metodologi Preskripsi

Untuk penilaian kemampuan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu dari analisis data sekunder yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) mengikuti penilaian seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwasanya bila sebuah daerah otonom baru selama 3 tahun berturut-turut selalu mengalami

peningkatan maka daerah otonom baru tersebut dapat dikatakan berhasil. Sedangkan bila sebuah daerah otonom baru selama 5 tahun berturut-turut selalu mengalami penurunan maka daerah otonom baru tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Kemudian dari penelitian mengenai evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu, penulis nantinya akan membuat kesimpulan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini yang menggabungkan dari analisis data primer berupa analisis kualitatif dari hasil wawancara dari stakeholders yang relevan dan ahli dibidangnya, lalu kemudian dari analisis data sekunder yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE). Dalam kesimpulan tersebut nantinya peneliti akan memberikan penilaian baik (asumsi kedua sasaran dari angka indeks berhasil dan kedua sasaran dari persepsi stakeholders menyatakan baik), agak baik (asumsi kedua sasaran dari persepsi stakeholders menyatakan baik dan hanya salah satu sasaran dari angka indeks berhasil), cenderung buruk (asumsi kedua sasaran dari angka indeks berhasil tetapi hanya salah satu sasaran dari persepsi stakeholders menyatakan baik), atau buruk (asumsi kedua sasaran dari angka indeks belum berhasil dan dari persepsi stakeholders tidak baik) terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran.

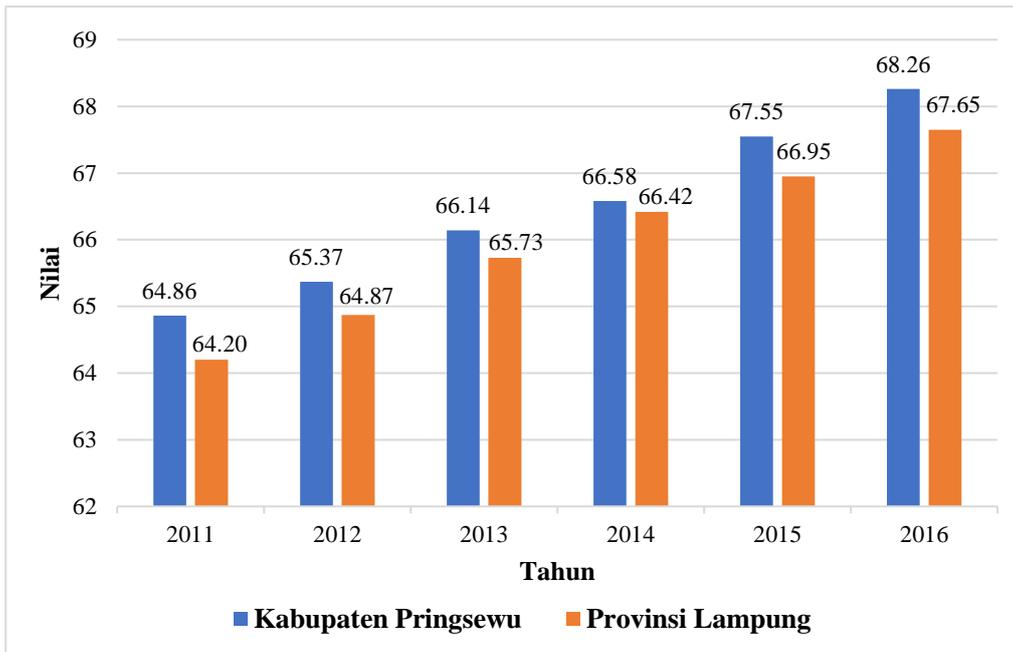
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis data yang disajikan sesuai dengan sasaran penelitian yakni kesejahteraan sosial dan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu.

3.1 Kesejahteraan Sosial Berdasarkan IPM dan Persepsi Stakeholders

A. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status kesejahteraan sosial adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM. Oleh karena itu, penulis menggunakan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan sosial Kabupaten Pringsewu dan supaya penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai kesejahteraan sosial Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran maka penulis menambahkan pula IPM Provinsi Lampung sebagai data pembanding. Digunakannya IPM Provinsi Lampung sebagai data pembanding dikarenakan sudah mencakup rata-rata nilai keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dan penelitian ini ingin melihat perkembangan Kabupaten Pringsewu dalam kontribusinya terhadap perkembangan Provinsi Lampung. Untuk mengetahui kesejahteraan sosial Kabupaten Pringsewu berdasarkan IPM dapat dilihat pada **Gambar 3.1** berikut.



Gambar 3.1

IPM Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

Sumber : BPS Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu

B. Berdasarkan Persepsi Stakeholders

Dari hasil data statistik diatas, penulis belum yakin sepenuhnya dari angka-angka tersebut. Dengan begitu penulis ingin menambah dan menguatkan data statistik diatas. Maka dari itu penulis melakukan pendekatan menggunakan metode kualitatif dengan cara menggali informasi mendalam dan terus

menerus serta bersifat iteratif hingga mencapai kondisi jenuh kepada stakeholder-stakeholder seperti dari sisi pemerintah, swasta, dan tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan sosial di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran. Adapun penjelasan yang didapat dari persepsi stakeholder dapat dilihat pada **tabel 3.1** dibawah ini.

Tabel 3.2 Persepsi Stakeholders Terhadap Kesejahteraan Sosial

PERSEPSI PEMERINTAH	
Narasumber	Hasil Analisis
Responden 1	Untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Pringsewu dalam perkembangannya menjadi otonomi daerah bila dilihat dari tingkat pendidikannya rata-rata mayoritas dari lulusan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu pula sumber daya manusia Kabupaten Pringsewu rata-rata bekerja pada sektor pertanian yakni menjadi petani atau buruh petani, dan di sektor jasa.
Responden 2	Dalam perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran yang dinilai secara on going mengenai sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu memiliki kemampuan sehingga sudah banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Pringsewu yang dikirim ke luar negeri seperti ke Malaysia untuk bekerja disana. Ini dikarenakan pada tahun 2017 lalu Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten pertama yang sudah ada dan memiliki kantor keimigrasian sendiri untuk pengurusan administrasi ke luar negeri.

Responden 3	Dalam konteks perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran yang dinilai secara on going mengenai kesejahteraan sosialnya dilihat dari IPM selalu meningkat walaupun masih dalam kategori sedang
Responden 4	Untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Pringsewu dalam perkembangannya menjadi otonomi daerah dari sisi pendidikan dan kesehatan sangat diperhatikan dan menjadi urusan wajib pemerintah yang paling penting
PERSEPSI SWASTA	
Narasumber	Hasil Analisis
Responden 5	Dari sisi kesejahteraan sosial untuk kaitannya dengan perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran yang mana merupakan daerah penunjang tidak begitu tertinggal dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung karena sudah banyak fasilitas-fasilitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu walaupun mayoritas fasilitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu ini swasta.
Responden 6	Bila melihat kesejahteraan sosial Kabupaten Pringsewu dalam konteks pertumbuhan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran tentunya sudah semakin meningkat dan maju setelah Kabupaten Pringsewu ini menjadi kabupaten sendiri. Semakin meningkat dan maju sumber daya manusia kabupaten pringsewu ini salah satunya dikarenakan faktor eksternal yang mana Kabupaten Pringsewu ini merupakan daerah yang paling dikenal oleh masyarakat diluar Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pringsewu.
Responden 7	Kesejahteraan sosial Kabupaten Pringsewu untuk sekarang ini dalam perkembangan otonomi daerah sudah cukup bagus karena pola pikir masyarakat sudah terbuka, inovatif, dan partisipatif. Selain itu memang benar adanya bahwa Kabupaten Pringsewu ini daerah yang terkenal oleh masyarakat diluar Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung menjadikan daerah ini sebagai daerah persinggahan jadi ada pengaruhnya juga walaupun hanya memberikan dampak sedikit dan tidak terlihat untuk perkembangan kualitas SDM kabupaten Pringsewu.
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT	
Narasumber	Hasil Analisis
Responden 8	Dari sisi kesejahteraan sosial Kabupaten Pringsewu setelah menjadi kabupaten sendiri dalam perkembangannya sudah semakin maju dan kreatif, dimana masyarakat sudah banyak yang mau berwirausaha karena adanya dukungan dari pemerintah seperti memberikan pelatihan-pelatihan. Selain itu dari tingkat pendidikan di Kabupaten Pringsewu sudah banyak yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Responden 9	Otonomi daerah Kabupaten Pringsewu menjadi daerah yang berkembang pesat dilihat dari kesejahteraan sosialnya yang memiliki kepedulian yang sudah cukup bagus. Dalam paguyuban ini sangat berperan pula dalam meningkatkan karakter dalam diri seseorang seperti adanya sosialisasi cara menangkal kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, mengadakan kegiatan sosial seperti kebersihan dan keamanan lingkungan yang harapannya dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu.
Responden 10	Untuk perkembangan kesejahteraan sosial dalam konteks otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran tentu sampai dengan saat ini sudah mengalami kemajuan, baik dari pola pikir akan kemajuan teknologi dan informasi maupun dari tingkat partisipasi masyarakatnya. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini ialah mencanangkan untuk memberdayakan masyarakat lokal, maksudnya itu segala bentuk program-program dari pemerintah harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat.

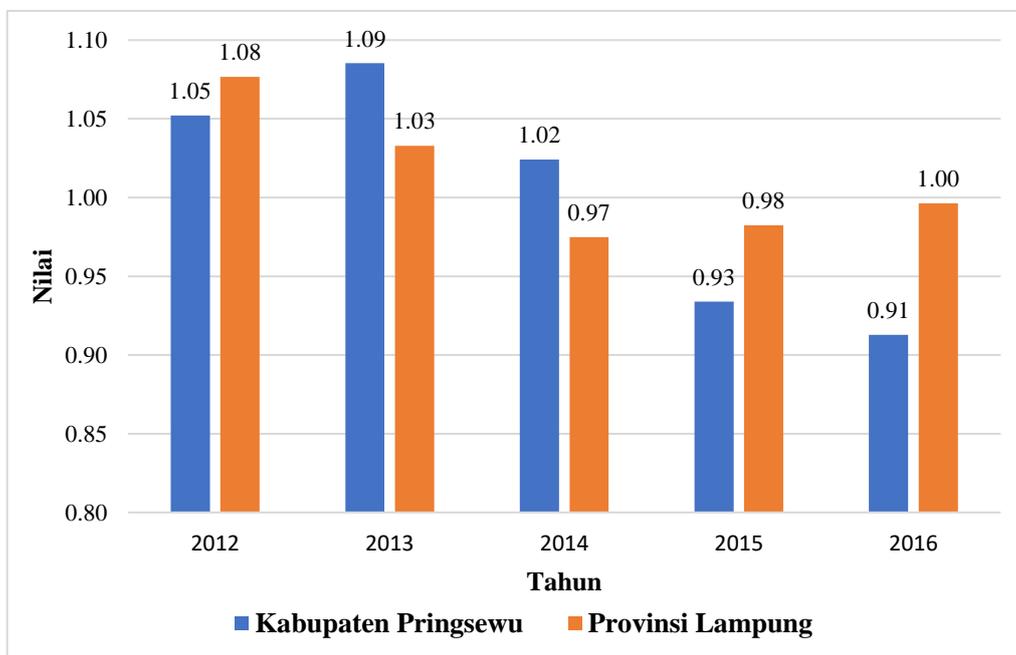
Sumber : Hasil Analisis, 2018

3.2 Perekonomian Daerah Berdasarkan IKE dan Persepsi Satekholders

A. Berdasarkan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE)

Salah satu alat ukur untuk mengetahui secara umum perkembangan perekonomian daerah ialah menggunakan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE). Fokus kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah pemekaran terjadi peningkatan kemampuan ekonomi pada daerah tersebut atau tidak. Oleh karena itu, penulis menggunakan nilai Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) untuk mengetahui perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu dan supaya penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai perekonomian daerah

Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran maka penulis menambahkan pula IKE Provinsi Lampung sebagai data pembanding. Digunakannya IKE Provinsi Lampung sebagai data pembanding dikarenakan sudah mencakup rata-rata nilai keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dan penelitian ini ingin melihat perkembangan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru yang sudah berjalan selama 9 tahun dalam kontribusinya terhadap perkembangan Provinsi Lampung. Untuk mengetahui perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung berdasarkan IKE dapat dilihat pada **Gambar 3.2** dibawah ini:



Gambar 3.2
IKE Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung Tahun 2012-2016 (%)

Sumber : Hasil Analisis, 2018 (setelah diolah)

Dari gambar 3.2 yang telah disajikan diatas dapat dilihat bahwa perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu berdasarkan nilai Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) diketahui bahwa dari periode tahun 2012-2016 perkembangan IKE Kabupaten Pringsewu berfluktuasi. Dari periode tahun 2012 nilai IKE Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 1,05. Kemudian pada periode tahun 2013 naik menjadi sebesar 1,09. Pada periode tahun 2014 nilai IKE Kabupaten Pringsewu terjadi penurunan dimana hanya sebesar 1,02. Untuk periode tahun 2015 nilai IKE Kabupaten Pringsewu kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,93. Dan sampai pada periode tahun 2016 lalu nilai IKE Kabupaten Pringsewu sedikit mengalami penurunan dimana hanya sebesar 0,91. Bila nilai IKE Kabupaten Pringsewu yang diperoleh dari tahun ke tahun semakin besar maka semakin baik pula kinerja/kemampuan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu. Akan tetapi, dari hasil IKE yang diperoleh dapat diketahui bahwa IKE Kabupaten Pringsewu dari periode tahun 2012-2016 berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja/kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu dari sisi perekonomian daerah pada periode tahun tersebut cenderung tidak stabil serta belum berjalan dengan baik dan maksimal. Kemudian dibandingkan pula dengan Provinsi Lampung perkembangan perekonomian daerah berdasarkan nilai

Indeks Kinerja Ekonomi (IKE), nilai rata-rata IKE Kabupaten Pringsewu hanya sebesar 1,002 masih dibawah nilai rata-rata IKE Provinsi Lampung yang sebesar 1,013. Hal ini menandakan bahwa kinerja/kemampuan ekonomi di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran masih rendah dan belum maksimal.

B. Berdasarkan Persepsi Stakeholders

Dari hasil data statistik diatas, penulis belum yakin sepenuhnya dari angka-angka tersebut. Dengan begitu penulis ingin menambah dan menguatkan data statistik diatas. Maka dari itu penulis melakukan pendekatan menggunakan metode kualitatif dengan cara menggali informasi mendalam dan terus menerus serta bersifat iteratif hingga mencapai kondisi jenuh kepada stakeholder-stakeholder seperti dari sisi pemerintah, swasta, dan tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana persepsi mengenai perekonomian daerah di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran. Adapun penjelasan yang didapat dari persepsi stakeholder mengenai perekonomian daerah di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dapat dilihat pada **tabel 3.2** dibawah ini.

Tabel 3.2 Persepsi Stakeholders Terhadap Perekonomian Daerah

PERSEPSI PEMERINTAH	
Narasumber	Hasil Analisis
Responden 1	Perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu dari sisi perekonomian daerah tumbuh cepat dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Pesawaran dan Mesuji. Perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu cepat tumbuh disebabkan oleh adanya peningkatan pada sektor jasa seperti jasa perbankan. Dimana jasa perbankan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan guna menggerakkan dan meningkatkan ekonomi daerah
Responden 2	Peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu setelah menjadi daerah otonom baru cukup cepat majunya, karena Kabupaten Pringsewu ini termasuk daerah lintas dan strategis. Selain itu pula salah satu indikator melihat perkembangan ekonomi di Kabupaten Pringsewu dilihat dari sudah banyaknya jasa perbankan. Keberadaan suatu jasa perbankan di suatu daerah sangat diperlukan mengingat setiap daerah khususnya otonomi daerah Kabupaten Pringsewu pasti melaksanakan pembangunan supaya ekonomi daerahnya dapat meningkat dalam konteks perkembangan daerah otonom baru. Kemudian untuk peningkatan ekonomi Kabupaten Pringsewu terdapat salah satu program dari Pak Bupati Kabupaten Pringsewu langsung yakni pemberdayaan masyarakat lokal.
Responden 3	Untuk perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dan menjadi daerah kabupaten sendiri sudah banyak bermunculan jasa perbankan dan perhotelan serta restoran. Selain itu untuk dewasa ini, pmda bukan lagi yang lebih menggerakkan perekonomian daerahnya supaya dapat meningkat akan tetapi lebih kepada memfasilitasi pemberdayaan masyarakat supaya perputaran ekonomi di Kabupaten Pringsewu ini lebih dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Responden 4	Setelah pemekaran dan menjadi daerah otonom sendiri bila melihat perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu termasuk pesat, sebab mulai tumbuh jasa-jasa seperti perbankan, perhotelan, dan perniagaan. Kemudian pula di Kabupaten Pringsewu ini terdapat sebuah program guna meningkatkan perekonomian daerahnya yakni program <i>one village one product</i> seperti di Kecamatan Pagelaran merupakan sentra tapis, Kecamatan Gadingrejo sentra anyaman bamboo, Kecamatan Ambarawa sentra batu bata dan genteng, serta Kecamatan Adiluwih sentrasentra hortikultura seperti tanaman cabai.
PERSEPSI SWASTA	
Narasumber	Hasil Analisis
Responden 5	Mengenai perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dan mejadi daerah otonomi baru cukup meningkat dilihat dari kondisi perkembangan infrastruktur seperti pembangunan pasar dan ruko-ruko. Kemudian pula letak Kabupaten Pringsewu ini berada ditengah-tengah sebagai daerah perlintasan yang dilewati untuk ke Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu.
Responden 6	Dalam perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran sampai saat ini bila berbicara perekonomiannya belum bisa dikatakan maju sekali atau masih tidak stabil. Hanya memang perkembangannya begitu cepat ketika pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Selain itu pula pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu ini didukung karena posisinya yang strategis yang banyak dilintasi oleh penduduk pendatang, walaupun hanya sebagai daerah yang menjadi tempat persinggahan saja namun ada manfaatnya juga.
Responden 7	Perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu sangat berkembang karena sudah banyak terdapat fasilitas perbankan, perhotelan, pasar, dan restoran serta mulai tumbuh UMKM-UMKM seperti usaha genteng ini yang mana pasti melakukan suatu pembangunan fisik yang sangat cepat dalam konteks guna perkembangan otonomi daerahnya, sehingga kebutuhan akan genteng ini sangat tinggi dan memberikan peluang untuk lebih banyak muncul usaha genteng yang lainnya. Peningkatan pembangunan ini semua masih berpusat di ibukota Kabupaten Pringsewu dan belum tersebar merata.

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT	
Narasumber	Hasil Analisis
Responden 8	Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Pemerintah daerah sangat memberikan peluang untuk masyarakat membentuk UMKM-UMKM sesuai bidang keahlian dan kemampuan, terlihat dari sudah adanya dukungan dari pemerintah seperti memberikan kredit usaha/ modal. Kemudian pemerintah pula perlu menyediakan wadah bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya.
Responden 9	Pada paguyuban ini terdapat kegiatan didalamnya mengenai penyelenggaraan usaha ekonomi kerakyatan guna memberikan perkembangan yang positif untuk perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu didalam perkembangannya menjadi daerah kabupaten sendiri setelah pemekaran dari daerah Kabupaten Tanggamus. Maksudnya penyelenggaraan ekonomi kerakyatan tersebut dalam paguyuban ini sangat didukung dan difasilitasi oleh pemda salah satunya tentang pendanaan agar meningkatkan peran aktif masyarakat untuk bisa berwirausaha, khususnya guna meningkatkan perkonomiannya sendiri dan memberikan peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Pringsewu pada umumnya.
Responden 10	Perekonomian suatu daerah sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangannya menjadi otonomi daerah. Untuk perekonomian daerah di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran tentu sampai dengan saat ini sudah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu ini berkembang karena disebabkan adanya peningkatan di sektor jasa seperti jasa perbankan, perhotelan, dan perniagaan. Kemudian didukung pula dengan berkembangnya UMKM-UMKM di masyarakat dan ini pula sangat difasilitasi oleh pemda seperti saat kegiatan Pringsewu Expo untuk memperingati hari jadinya Kabupaten Pringsewu, pemerintah sangat memberdayakan kalangan perbankan, dunia usaha, dan lain-lain guna memberikan dampak yang positif untuk perekonomian Kabupaten Pringsewu.

Sumber : Hasil Analisis, 2018

3.3 Penilaian Terhadap Kemampuan Otonomi Daerah Kabupaten Pringsewu Setelah Pemekaran

Dalam melakukan penilaian ini nantinya peneliti akan memberikan penilaian berhasil atau belum berhasil terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran, untuk memberikan penilaian berhasil atau belum berhasil ini peneliti mengambil dari hasil analisis data dengan metode kuantitatif yang menggunakan angka-angka indeks

pembangunan manusia (IPM) dan indeks kinerja ekonomi daerah (IKE). Selanjutnya, penilaian berhasil atau belum berhasil ini diperjelas dari hasil analisis data dengan metode kualitatif yang menggunakan persepsi stakeholders. Berdasarkan hasil analisis data dari metode kuantitatif yang menggunakan angka-angka indeks dan metode kualitatif yang menggunakan persepsi stakeholders, penilaian kemampuan atau kinerja penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penilaian Kemampuan Otonomi Daerah Kabupaten Pringsewu

Sasaran	Analisis	Penilaian
Kesejahteraan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persepsi Stakeholders	Berhasil, karena dalam konteks perkembangan otonomi daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dan modal dasar untuk memajukan daerah, untuk itu pemerintah daerah dalam setiap rencana pembangunan selalu menyertakan pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Kemudian untuk mengakses pendidikan dan kesehatan sudah sangat mudah dengan didukung sudah banyaknya fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan baik itu statusnya swasta maupun negeri. Kemudian pandangan atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga sudah sangat tinggi.
Perekonomian Daerah	Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dan Persepsi Stakeholders	Belum Berhasil, akan tetapi perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu memang begitu cepat dalam perkembangan otonomi daerahnya setelah pemekaran seperti berkembangnya jasa perbankan dan perhotelan yang didukung lokasi yang strategis sebagai daerah persinggahan, sangat mendorong ekonomi kerakyatan dengan adanya penyertaan modal menyebabkan mulai tumbuh UMKM-UMKM, pembangunan pasar dan ruko-ruko. Kemudian prediksi kedepan akan berkembang gudang-gudang penyimpanan akibat faktor sebagai daerah lintas koridor barat.

Sumber : Hasil Analisis, 2018

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dengan fokus sasarannya ialah kesejahteraan sosial dan perekonomian daerah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan penyelenggaraan

otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran adalah agak baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sub Direktorat Konsistensi Statistik. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. ISBN 978-979-7240998-4. Jakarta.

Pahlevi Indra, dkk. 2016. *Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah*. Cetakan Kesatu. PT Balai Pustaka. Jakarta Timur

TUGAS AKHIR/ TESIS/DISERTASI

Hamami. 2016. Evaluasi Kinerja Perekonomian Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesawaran. *Tugas Akhir*. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Institut Teknologi Sumatera

Yuliati, E. 2011. Evaluasi Hasil Pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kabupaten. *Tesis*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Depok

Rachim, R. F. Pustika. 2013. Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro, Semarang.

Fatmawati. 2011. Faktor-Faktor Keberhasilan Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi*. Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. IPB. Bogor.

Abdullah. 2011. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi

Sulawesi Barat). *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana IPB. Bogor. Jawa Barat.

JURNAL/ARTIKEL

Susanti. 2014. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 3 No. 2 Hal 249-267

Ratnawati, Tri. 2010. Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?. *Jurnal Ilmu Politik* Edisi 21 Hal 221-235.

LAPORAN

Bappenas dan UNDP. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah*. Jakarta

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran*. Jakarta

Hariyoga, H., dkk. 2008. *Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonom Baru*. Direktorat Otonomi Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Jakarta'

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI dan Laboratoeium Penelitian, Pengabdian pada Masyarkat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran. 2008. *Profil dan Pemetaan Day Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Kota di Indonesia*. Jakarta

Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 2016. *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir*

*Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2011-2016. Pringsewu*

*. 2016. Rancangan
Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022. Pringsewu*

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Kemendagri RI. 2014. Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom
Baru

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120-251
Tahun 2014 Tentang Penetapan Peringkat
dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Secara Nasional

WEBSITE

<http://ipm.bps.go.id/page/ipm> (diakses pada tanggal
21 Mei 2018, pukul 14.33 WIB)